

SUB TEMA:
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

EKSPLORASI NILAI-NILAI MARHAEN DALAM PENGANGGARAN DAERAH

Tantri Bararoh

*Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya
e-mail: tantribararoh@yahoo.co.id*

Abstract

This study aims to explore the values of Marhaen in budgeting in local government. Marhaen values should be internalized because budgeting is full of capital values. Towards the welfare of the common people "the Marhaen " full consciousness and then budgeting character in the regional administration capitalism should be removed. Excavation other values through Marhaen values that Deity, Justice and Independence. This study uses epistemology Bewust internalization of budgeting in local government. While Bewust used as a methodology in each elements. Used to justify a social Bewust awareness understanding informants based on their experience. Democracy Bewust used for the values of the other resulting from the process of social Bewust. The results indicate that the purpose local area budgeting should be changed, not just as a spectator but making the community involved in the budgeting process.

Keywords: *budgeting, capitalism, marhaenism, social bewust, and democracy bewust, social bewust, democrati bewust.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 13 Tahun 2006 merupakan proses yang panjang dan berjenjang, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan/kecamatan sampai dengan kota/kabupaten. Hasil yang tersusun berupa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dijadikan dasar dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif.

Proses penganggaran merupakan kegiatan yang penting, karena anggaran memiliki fungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, mengevaluasi prestasi (sebagai tolok ukur kinerja) dan sebagai alat pengendalian (Kenis, 1979; Kren, 1992; Hansen dan Mowen, 1997). Untuk itu dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), legislatif sebagai wakil rakyat yang berfungsi

menjamin terealisasinya aspirasi masyarakat diberi kesempatan berperan aktif dalam proses penganggaran (Sri, 2001; Syarifuddin, 2010; Damayanti, 2010; Razak, 2011; Calabro, 2011; Bararoh, 2013; dan Sopanah 2013).

Proses penganggaran pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan bentuk akuntabilitas publik yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik kepada masyarakat, maka baik eksekutif maupun legislatif diwajibkan bersikap transparan dan akuntabel. Untuk mengusahakan agar pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel dibutuhkan kehadiran akuntansi sektor publik.

Agar pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan sesuai dengan paradigma baru yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*, maka—terutama setelah era otonomi—akuntansi sektor publik, termasuk penyusunan anggaran, mengalami suatu reformasi atau perubahan yang sangat signifikan. Karena terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan APBD, tidak hanya eksekutif dan legislatif saja, namun juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, dan bahkan masyarakat luas (publik), maka lembaga-lembaga yang terlibat maupun yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran tersebut juga berpotensi mampu membawa perubahan pada wajah akuntansi sektor publik ke arah yang lebih baik (atau sebaliknya).

2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada eksplorasi nilai-nilai Marhaen dalam proses penganggaran daerah, pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana nilai-nilai Marhaen dapat dieksplorasi dalam penganggaran daerah? Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menjawab bagaimana nilai-nilai Marhaen terinternalisasi dalam proses penganggaran daerah.

Proses penganggaran merupakan kegiatan yang penting, karena anggaran memiliki fungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, mengevaluasi prestasi (sebagai tolok ukur kinerja) dan sebagai alat pengendalian (Kenis, 1979; Kren, 1992; Hansen dan Mowen, 1997). Untuk itu dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), legislatif sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjamin terealisasinya aspirasi masyarakat diberi kesempatan berperan aktif dalam proses penganggaran (Sri, 2001; Syarifuddin, 2010; Damayanti, 2010; Razak, 2011; Calabro, 2011; Bararoh, 2013; dan Sopanah 2013).

Proses penganggaran pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan bentuk akuntabilitas publik yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik kepada masyarakat, maka baik eksekutif maupun legislatif

diwajibkan bersikap transparan dan akuntabel. Untuk mengusahakan agar pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel dibutuhkan kehadiran akuntansi sektor publik.

Agar pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan sesuai dengan paradigma baru yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip *good governance*, maka—terutama setelah era otonomi—akuntansi sektor publik, termasuk penyusunan anggaran, mengalami suatu reformasi atau perubahan yang sangat signifikan. Karena terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan APBD, tidak hanya eksekutif dan legislatif saja, namun juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, dan bahkan masyarakat luas (publik), maka lembaga-lembaga yang terlibat maupun yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran tersebut juga berpotensi mampu membawa perubahan pada wajah akuntansi sektor publik ke arah yang lebih baik (atau sebaliknya).

Penelitian ini lebih memfokuskan pada eksplorasi nilai-nilai Marhaen dalam proses penganggaran daerah, pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana nilai-nilai Marhaen dapat dieksplorasi dalam penganggaran daerah? Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menjawab bagaimana nilai-nilai Marhaen terinternalisasi dalam proses penganggaran daerah.

3. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi sektor publik di bidang penganggaran yang berkaitan dengan proses penganggaran daerah yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang berbasis Marhaenisme. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan penganggaran terkait dengan lembaga legislatif maupun eksekutif. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyadaran dalam menyampaikan agar lebih transparan dalam proses penganggaran tanpa ada diskriminatif.

a. Pentingnya Nilai-Nilai Marhaen Dalam Proses Penganggaran Daerah

Istilah Marhaen semula adalah nama seorang petani miskin yang dijumpai oleh Soekarno di selatan Bandung, Jawa Barat, yang beliau jadikan simbol sebagai *verzamelnaam*¹ yaitu rakyat yang menjadi korban dari kolonialisme, agama ataupun paham politiknya (Abdulgani, 1964:34). Saat bertemu dengan Marhaen, Soekarno bertanya: “Tanah ini siapa pemiliknya?”, “Pacul ini siapa yang memiliki?”, “Segala sesuatu alat-alat ini siapa yang memiliki?” Marhaen, menjelaskan bahwa semua itu miliknya (Soekarno, 1965:7). Dalam

¹*Verzamelnaam* sebagai simbol nama guna menggerakkan rakyat Indonesia dan yang menjadi korban dari kolonialisme agama ataupun paham politiknya.

konteks ini, maksud dari pertanyaan Soekarno adalah walaupun Marhaen memiliki segalanya namun ia tetap merupakan korban, karena ia tetap miskin.

Lebih lanjut Abdulgani (1998:2) menjelaskan bahwa Marhaen itu adalah representasi “wong cilik” atau “orang kecil”. *Wong cilik*, “kaum Marhaen”, di Indonesia sesungguhnya kaum yang masih punya alat produksi dan alat modal. Mereka memiliki cangkul, bajak (wekulu), tanah dan kerbau. Marhaenis tidak menjual tenaga atau alat-alat produksinya kepada orang lain/pemilik modal, tetapi dia sendiri pemilik segala-galanya. Marhaen seperti pedagang kecil, nelayan kecil, pengrajin kecil dan sebagainya. Mereka itu hidup melarat karena dieksploitasi oleh kolonialisme (Boden, 2008:125). Abdulgani (1964:37) menyatakan bahwa “proletar” adalah “buruh kecil” yang menjual tenaganya kepada pemilik kaum tani-bertanah, atau kepada pemilik pabrik-pabrik besar, tetapi “Marhaen” tidak boleh dipisahkan dari pengertian lapisan rakyat kecil.

Lev (2010:60) menyatakan bahwa Marhaen adalah representasi orang miskin yang ada di Indonesia. Sementara Abdulgani (1982:2) menambahkan Marhaenis adalah seorang nasionalis, seorang patriot dan seorang pejuang bangsa, yang (a) mengorganisir berjuta-juta “*wong cilik*”, “orang kecil” atau “kaum Marhaen” yang bersama-sama dengan mereka berjuang melawan kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme (b) bersama-sama membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Lebih lanjut, Abdulgani (1982:2) menjelaskan dalam arti tertulis, marhaenisme dapat dinamakan juga sebagai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; karena nasionalisme “kaum Marhaen” adalah nasionalisme yang sosial-*bewust*² dan karena “kaum Marhaen” adalah demokrasi-*bewust*³.

Sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme adalah dua asas yang bersumber pada “budi nurani manusia”.⁴ Hal ini seperti yang disampaikan oleh Soekarno sendiri dalam kutipan berikut ini:

²Sosial *Bewust* (SB) merupakan bentuk penyadaran dan penginsafan kepada masyarakat “kaum Marhaen” dan bersama para penyelenggara negara yang sadar dan insaf akan makna bernegara (hak dan kewajiban). Hal ini diwujudkan dalam sistem pemerintahan daerah dan dipraktikkan dalam proses penganggaran daerah (APBD).

³Demokrasi *Bewust* (DB) merupakan bentuk penyadaran dan penginsafan kepada “kaum Marhaen” dan bersama para penyelenggara negara yang sadar dan insaf akan makna demokrasi, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. DB merupakan bentuk kinerja demokrasi yang sadar akan pelibatan masyarakat dalam sistem pemerintah daerah, yaitu pelibatan perwakilan masyarakat dalam proses penganggaran daerah (APBD).

⁴Soekarno. 1932. Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Tulisan dalam “Fikiran Rakyat”, bagian dari tulisan Di bawah Bendera Revolusi. 1964. Hal 175.

“...Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi, suatu nasionalisme yang mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rejeki...” (Soekarno, 1964:175).

Selain itu Soekarno juga mengatakan bahwa:

“...Sosio-demokrasi adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rejeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi...” (Soekarno, 1964:175).

Sementara Baswedan (2004) menjelaskan bahwa:

“...Marhaenism is a socio-nationalist ideology promoted by former President Sukarno. It is a populist ideology that idealized the average Indonesian "little man." Marhaen is the name of a poor farmer...” (Baswedan, 2004:676).

Pikiran-pikiran dasar tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme seperti yang dimaksudkan dalam sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi tersebut, Marhaen sebagai simbol kekuatan rakyat yang berjuang melawan segala sistem yang menindas dan memelaratkan rakyat. Sementara Hering (1992:500) menambahkan bahwa Soekarno berhasil menyelamatkan negara melalui Marhaen. Hal ini jelas bahwa Marhaen merupakan simbol perlawanan rakyat “kecil” yang memerangi kezaliman.

Kaum Marhaen ini terdiri dari tiga unsur (a) unsur kaum proletar Indonesia (buruh) (b) unsur kaum tani melarat Indonesia, dan (c) kaum melarat Indonesia yang lain-lain (Abdulgani, 1964:37). Hal ini diperkuat oleh Boden (2008:113) yang menyatakan bahwa marhaenisme mencoba mengkombinasikan tiga elemen yang antara lain islam, nasionalisme dan sosialisme marxis.

Soekarno sebagaimana diacu oleh Abdulgani (1964:37) menyatakan bahwa jika meneliti marhaenisme, maka peneliti harus paham tentang marxisme. Karena untuk memahami ajaran Soekarno, paling sedikit harus menguasai pengetahuan, pertama pengetahuan tentang situasi dan kondisi Indonesia, dan kedua pengetahuan tentang marxisme. Beliau berkali-kali menegaskan, bahwa orang tidak akan dapat memahami marhaenisme, jika tidak mempelajari dan mengerti marxisme (Abdulgani, 1964; Wuryadi *at al.*, 2004; Madridista, 2010).

C. METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara yang mendalam ini sangat penting guna menggali aspek kognitif, evaluatif, ideologis, motivasi atau alasan bertindak dari berbagai aktor yang terlibat dalam penganggaran daerah kota Surakarta.

b. Teknik Observasi Partisipasi

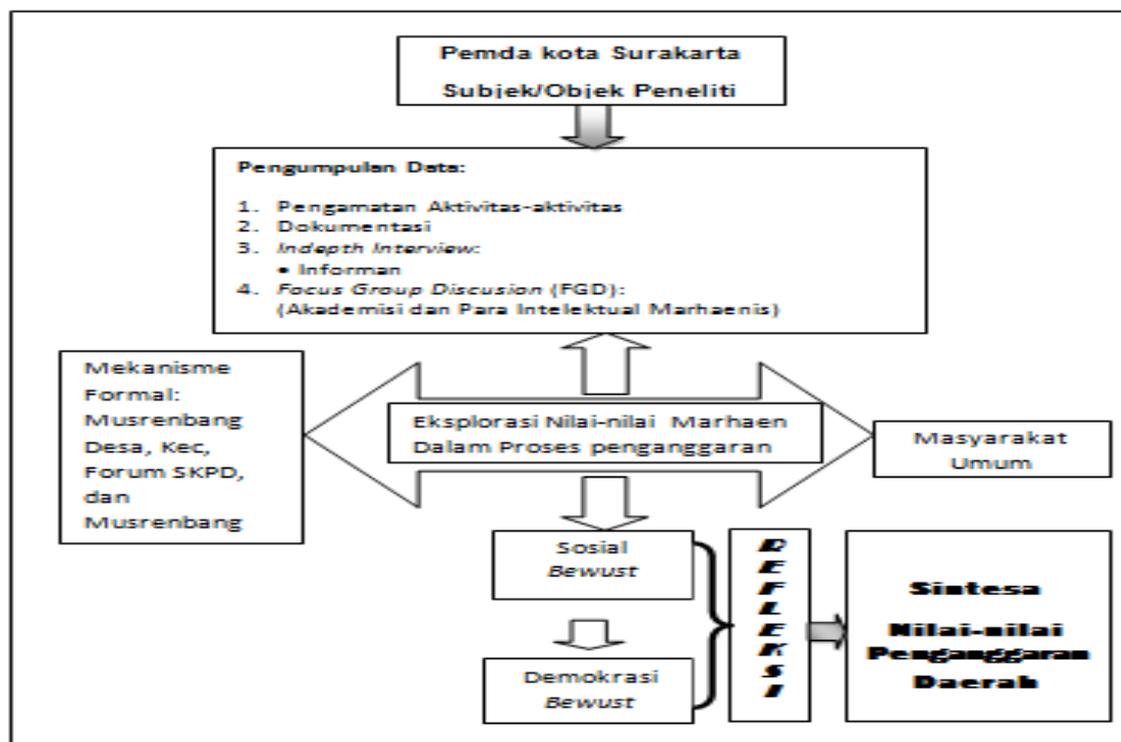
Untuk lebih memudahkan digunakan pedoman gagasan oleh Patton dalam Sugiyono (2005:68) tentang yakni, 1) *place* 2) *actor* dan, 3) *activity*, kegiatan aktor. Denzin dan Lincoln (2009) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif beragam metode yang diterapkan saling berkaitan guna menghasilkan yang lebih baik.

c. Studi Dokumentasi dan Perekam Arsip

Kartodirdjo (1983) dan Agger (2003) mengatakan bahwa semua kegiatan pada dasarnya tidak lepas dari proses sejarah yang melingkupinya. Sejarah tentang penyusunan sampai pada pelaksanaan APBD dapat ditelusuri melalui dokumentasi dan rekaman arsip (Yin, 1996).

2. Teknik Analisis

Secara ringkas teknik analisis penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.



GAMBAR 1. KERANGKA TEKNIK ANALISIS DAN TAHAPAN PENELITIAN

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Nilai Ketuhanan dalam Penganggaran Daerah

Kearifan Marhaen yang tercermin dalam nilai ketuhanan hasil wawancara dengan Jokowi (walikota Surakarta) mengungkapkan pemaknaannya atas nilai ketuhanan sebagai berikut:

“...semua orang diberi ruang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing itu saja. Bung Karno juga seperti itu, yang penting harus berketuhanan. Ketuhanan dimaknai berdasarkan kesadaran {berketuhanan}...”

Sebagaimana yang diajarkan Soekarno, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, artinya kepribadian merupakan cerminan dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi suri teladan bangsa.

Dalam visi-misi awalnya, lima tahun pertama program Jokowi adalah menata kota dan birokrasi merelokasi menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara manusiawi, tanpa demonstrasi dan anarki. Hal ini merupakan bentuk amalan dari nilai ketuhanan. Pembangunan pasar tradisional bisa dikelola lebih rapi dari sebelumnya. Birokrasi diatur sedemikian rupa untuk berprinsip melayani masyarakat. Walaupun langkah-langkah ini, tidak selalu mulus, namun Jokowi menuai respon positif atas gagasannya.

Gagasan pembenahan terhadap tata pemerintahan yang dilakukan Jokowi (walikota Surakarta) meliputi: a) mereformasi *mind set* birokrat, b) membangun sistem pemerintahan, dan c) pembangunan untuk kesejahteraan rakyat miskin menjadi skala prioritas (kembali ke “konsep Marhaen”). Hasil wawancara dengan Jokowi (walikota Surakarta) mengungkapkan fakta seperti berikut ini:

“Saya langsung turun lapangan dan saya desain sendiri. Semua saya lakukan karena [berdasarkan kuatnya keinginannya] untuk [menyejahterakan] rakyat kecil [kaum Marhaen]. [Selain itu, tujuan] saya turun lapangan sendiri agar dapat mendengar keluh kesah langsung dari warga masyarakat. Hasilnya, ditemukan kesepakatan, yaitu pembenahan sistem pemerintahan.”

Kebersamaan inilah yang dibangun dan dikreasi dalam bentuk program sebagaimana misi awal, yaitu menata birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Semua ini bentuk pengamalan terhadap nilai ketuhanan dan hal ini tercermin dalam proses penganggaran daerah secara keseluruhan

2. Keberadaan Nilai Kemandirian dalam Penganggaran Daerah

Penetapan APBD melalui proses yang panjang dan berliku. Gebrakan yang dilakukan Jokowi dalam membuat kebijakan yang “pro rakyat kecil” dan bersikap kritis atas modal asing, memberikan angin baru pada kekuasaan yang terus membusuk di negeri ini. Kekuasaan yang selama ini dipersonifikasikan dengan pro modal, korup, elitis, dan oligarkis (Winters, 2011). Hasil wawancara dengan Jokowi (walikota Surakarta) mengungkapkan kenyataan sebaliknya sebagai berikut:

“...para pemimpin pusat kurang berpihak kepada rakyat dan cenderung mementingkan kapital asing. [Sementara] ini, pemerintah pusat tidak memihak rakyat. Seharusnya perizinan kepemilikan usaha asing dipersulit. Kebijakan ini jelas tidak memihak kepada rakyat kecil (Marhaen)”.

Cerminan kritis tersebut, atas kepentingan modal merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

Berdikari menjadi semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan melindungi setiap warga negara. Hasil wawancara dengan walikota Surakarta (Jokowi) yang sangat menggugah “kaum Marhaen” sebagai berikut:

“...dulu bung Karno mengatakan Berdikari dalam bidang ekonomi, saya tidak seperti bung Karno untuk negara, saya [Jokowi] hanya sebagian kecil yaitu PKL, karena PKL itu mandiri. Dulu bung Karno menyampaikan bahwa bumi Indonesia ini ada emas, batu bara, nikel, kalau bangsa kita, belum bisa menggali sendiri, biarkan nanti anak cucu kita yang menggali Tetapi apa? Sekarang sudah menjadi PMA semua, yang menikmati siapa? Sekarang 76 persen tambang dipegang oleh asing, 76 persen coba? Artinya tidak menambah hajat orang banyak namanya? Bangsa Indonesia sudah keluar dari Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Dengan 76 persen pertambangan dikuasai pihak asing menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak memihak kepada rakyat, “khususnya kaum Marhaen”.

Semua kebijakan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama hasilnya berbuah manis. Kota Surakarta yang selama 40 tahun tidak membangun pasar rakyat, kini memiliki sudah 15 pasar. Bahkan terjadi lonjakan kenaikan PAD dari sektor pasar tradisional dari Rp 7,8 miliar (tahun 2004) menjadi Rp 19,2 miliar (tahun 2009). Sejalan dengan itu kebijakan di bidang pengelolaan terminal, hotel dan restoran, reklame, dan pakiran juga memberikan pemasukan PAD yang terus meningkat. Sementara, tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya investasi pedagang kecil beromzet kurang dari Rp 1 juta hingga bernilai miliaran rupiah berkat adanya sistem pengurusan izin yang cepat dan transparan.

3. Keberadaan Nilai Keadilan dalam Penganggaran Daerah

Marhaenisme bertujuan menghapus ketidakadilan sistem yang diterapkan secara terhadap Marhaen. Nilai keadilan menjadi penting sekali di dalam alokasi anggaran daerah. Hasil wawancara dengan Marsudi Fandinegara (tokoh Marhaenis), mengungkapkan bahwa Marhaen memiliki nilai keadilan yang berperikemanusiaan. Artinya bahwa Marhaenisme sangat kental dengan rasa keadilan. Untuk itu Marhaenis dan kaum Marhaen bersama-sama berjuang untuk melawan ketidakadilan.

Menurut Rawls (1999:3), keadilan adalah kebajikan utama dalam suatu organisasi. Keadilan merupakan perlakuan yang tidak sewenang-wenang kepada yang lemah (keseimbangan). Begitu pula dalam penganggaran daerah (APBD), program-programnya harus dapat dirasakan langsung oleh rakyat maka dalam pengambilan kebijakan (APBD) harus benar-benar adil dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Hasil temuan Pemkot Surakarta jelas menggunakan konsep Marhaen dan sistem manajemen yang bernafaskan keadilan. Hasil wawancara dengan Jokowi (walikota Surakarta) mengungkapkan fakta sebagai berikut:

“...Oh tidak “gap” seperti itu kita perbaiki, yang sekarang kita punya sistem kartu kesehatan dan pendidikan...dahulu pendidikan punya 3,4 miliar, sekarang sudah punya 23 miliar, kenaikannya kan luar biasa.”

Hal ini menunjukkan bahwa APBD-Surakarta memprioritaskan kesejahteraan rakyat di mana beasiswa pendidikan dikhususkan kepada “kaum Marhaen”. Khusus “kaum Marhaen” dibebaskan SPP yang ditujukan murni untuk keluarga miskin. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga dibantu untuk fasilitasi alat kelengkapan dan lainnya. Beasiswa tersebut diberikan khusus yang bersekolah di SMK dan kebijakan ini mencerminkan keadilan, karena bantuan diberikan langsung kepada yang miskin. Hal ini menunjukkan keadilan dalam penganggaran daerah yang memprioritaskan orang miskin, yang berkonsepkan anggaran berbasis Marhaen.

E. SIMPULAN

Esensi dari Marhaen adalah menyejahterakan masyarakat sedangkan APBD bersumber dari rakyat, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Benang merahnya adalah sama-sama bertujuan menyejahterakan rakyat. Menurut Soekarno K3 merupakan wujud dari pengabdian, yaitu mengabdikan kepada negara dan mengabdikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketuhanan merupakan kunci utama sehingga bermuara pada arah dan tujuan konsep Marhaen, yang mengajarkan ketuhanan, kemandirian, dan keadilan. Manajemen anggaran harus berfokus

pada program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya orang kecil “kaum Marhaen”. Kekuatan ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain menjadi pilar utama yang mengkokohkan manusia agar berbudi nurani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. 1964. “*Sosialisme Indonesia*”, Cetakan ke IV. Yayasan Prapantja. Jakarta: P.N. Percetakan Negara.
- Abdulgani, R. 1998. “Marhaenisme (Ibu Kandung Pancasila)”, *Harian Dwi Warna* Edisi III-Volume 01/No.003. September: Hal. 15.
- Agger, B. 2003. “*Teori Sosial Kritis Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*”, Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baswedan, A. R. 2004. “Political Islam in Indonesia Present and Future Trajectory”, *Journal Asian Survey*, vol. 44, no. 5: p. 669-690.
- Bararoh, T. 2013. “Konstruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Marhaenisme”. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Boden, R. 2008. “Cold War Economics: Soviet Aid to Indonesia”, *Journal of Cold War Studies*, Vol.10, No. 3: pp. 110-128.
- Calabro, A. 2011. “*Governance Structures and Mechanisms In Public Service Organizations: Theories, Evidence and Future Directions*”. London New York: Physica-Verlag. A Springer Company.
- Damayanti, Ratna A. 2010. “Hubungan Keagenan Pemerintah Daerah Dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi”. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln Yvona S. 2009. “Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif”, *Handbook of Qualitative Research*. Penerjemah: Tim Penerjema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Hal. 1-20.
- Hansen, Don R. dan Mowen, M. 2000. “*Management Accounting*”, 5th edition. South Western College Publlishing.
- Hering, B. 1992. “Soekarno: The Man and the Myth: Looking Through a Glass Darkly”, *Journal, Modern Asian Studies*, 26, 3: pp. 495-506.
- Jackson, K.D., dan Pye, L.W. 1978. “*Political Power and Communications in Indonesia*”, Berkerley Los Angeles: University of California Press.

- Kenis, I. 1979. "Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance", *The Accounting Review*. Vol. 54/4: 707-721.
- Kren, L. 1992. "Budgetary Participation and Managerial Performance The Impact of Information and Environmental Volatility", *The Accounting Review*. Volume 67 No.3.
- Kartodirdjo, S. 1983. "*Metode Penggunaan Bahan Dokumen. Dalam Koentjaraningkrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat*". Jakarta: Gramedia.
- Lev. D. S. 2010. "Political Parties in Indonesia", *Journal of Southeast Asian History*, diunduh pada 17 Desember 2010 jam 08:02.
- Lane. J.E. 1990. "*Institutional Reform: A Public Policy Perspective*". Worcester: Gower Publishing Company.
- Madridistra. 2010. "*Kembalilah ke Ajaran Marhaenisme Soekarno*". Tersedia online <http://marhaenismesoekarno.htm>. diunduh pada 26 Agustus 2010, jam 03:00.
- Rawls, J. 1999. "*A Theory of Justice*". Massachusetts: Harvard University Press.
- Razak, A. 2011. "Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Mayapada)", *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Soekarno, 1964. "*Dibawah Bendera Revolusi*", Djilid Kedua, Tjetakan Keempat. Jakarta: Panitia Penerbit: Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno, 1965. "*Dibawah Bendera Revolusi*", Djilid Keempat. Tjetakan Keempat. Jakarta: Panitia Penerbit: Dibawah Bendera Revolusi.
- Soekarno, 1965. "*Ever Upward Never Go Down*". Jakarta: Departemen Penerangan R.I.
- Sopannah. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal". *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Sri, L. 2001. "*Analisis Peningkatan Belanja Rutin Daerah, dalam Abdul Halim, 2001: 199-197, Manajemen Keuangan Daerah*". Jogyakarta: Penerbit UMP AMP-YKPN.
- Sugiyono. 2005. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. 2010. "Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali", *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Vandertoep, Scott, W. dan Johnston, Deirdre D. 2009. "*Research Methods For Everyday Life, Blending Qualitative and Quantitative Approaches*", First Edition, Jossey-Bass. A Wiley Imprint.

- Von Hagen, J. 2002. *“Budgeting Institutions for Aggregate Fiscal Discipline”*. Center for European Integration Studies.
- Winters, Jeffrey, A. 1999. *“Power In Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa”*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Winters, Jeffrey, A. 2011. *“Oligarki”*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama dan Kompas Gramedia.
- Wuryadi, H., Effendi, N.E., dan Wardhana, W. 2004. *“Perspektif Pemikiran Bung Karno”*. Cetakan Pertama Jakarta: Penerbit Lembaga Putra Wajar.
- Yin. Robert K. 1996. *“Studi Kasus (Desain dan Metode)”*, Penerjemah: Djauzi Mudzakir. Jakarta Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *“Keuangan Negara”*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang *“Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”*.